



Sultan Minta Kepala Daerah Hati-Hati Kelola Anggaran



Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (tengah), berfoto bersama kepala daerah di DIY yang terpilih dalam Pilkada 2024 di Gedhong Wilis, kompleks Kepatihan Jogja, Rabu (5/2). Pasangan kepala daerah yang berfoto bersama Gubernur DIY meliputi: Wakil Bupati Gunungkidul terpilih Joko Parwoto (kiri), Wakil Bupati Kulonprogo terpilih Ambar Purwoko (dua kiri), Wakil Bupati Bantul terpilih Aris Suharyanta (tiga kiri), Bupati Kulonprogo terpilih Agung Setyawan (empat kiri), Bupati Gunungkidul terpilih Endah Subekti Kuntariningsih (lima kiri), Bupati Bantul terpilih Abdul Halim Muslih (empat kanan), Bupati Sleman terpilih Harda Kiswaya (tiga kanan), Wali Kota Jogja terpilih Hasto Wardoyo (dua kanan), dan Wakil Wali Kota Jogja terpilih Wawan Harmawan (kanan).

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 untuk efisien dan berhati-hati dalam mengelola anggaran.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

- ▶ Sultan mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat dan dikelola secara bijaksana.
- ▶ Wali Kota Jogja terpilih, Hasto Wardoyo, mengatakan persoalan sampah menjadi salah satu tema utama dalam pertemuan tersebut.

Permintaan orang nomor satu di Pemda DIY itu disampaikan saat menggelar pertemuan dengan para kepala daerah terpilih, di kompleks Kepatihan, Jogja, Rabu (5/2). Acara yang diselenggarakan tertutup itu berlangsung selama lima jam mulai pukul 08.30 WIB sampai 13.30 WIB di Gedung Wilis kompleks Kepatihan, Pemda DIY.

Sultan Minta...

Semua kepala daerah hasil Pilkada 2024 hadir dalam pertemuan itu, minus Danang Maharsa, Wakil Bupati Sleman terpilih. Mereka yang hadir yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja terpilih Hasto Wardoyo, Wawan Harmawan; Bupati Sleman terpilih Harda Kiswaya; Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih, Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta; Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul terpilih, Endah Subekti Kuntaringsih-Joko Parwoto; dan Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo terpilih, Agung Setyawan-Ambar Purwoko Sekda DIY, Beny Suharsono, menyatakan efisiensi anggaran menjadi sorotan utama dalam pertemuan itu. Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat dan dikelola secara bijaksana. "Anggaran harus digunakan sebaik mungkin, tidak boleh berlebihan. Kepala daerah terpilih diminta untuk lebih efisien dan berhati-hati dalam penggunaannya," ujar Beny sesuai pertemuan.

Beny menambahkan pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi serta upaya membangun komunikasi yang lebih baik ke depan. Menurutnya, komunikasi yang lancar antara Gubernur DIY dan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. "Pak Gubernur sangat antusias, karena sebelum pelantikan formal, beliau ingin menyampaikan langsung pesan-pesan penting, terutama soal membangun komunikasi yang lebih erat. Tidak boleh ada sekat antara kepala daerah kabupaten/kota dengan gubernur," ujar Beny.

Ia juga menambahkan koordinasi antara jajaran Pemda DIY dengan kepala daerah terpilih harus semakin diperkuat. Selain itu, tema-tema pembangunan

perlu sejalan agar program yang dijalankan selaras dengan visi daerah. Dalam pertemuan tersebut, kepala daerah terpilih juga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing wilayah.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan memberikan instruksi khusus terkait pelantikan yang dijadwalkan pada 20 Februari. "Semua kepala daerah terpilih harus siap dilantik pada tanggal tersebut," tegas Beny.

Masalah Sampah

Wali Kota Jogja terpilih, Hasto Wardoyo, mengatakan persoalan sampah menjadi salah satu tema utama dalam pertemuan tersebut. Ia menyampaikan Gubernur DIY memberikan optimisme dalam penanganan sampah, terutama dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana baru, termasuk di Bantul dan Sleman. "Untuk Kota Jogja, sampah dan lingkungan harus menjadi prioritas. Harus ada *refocusing* anggaran yang diarahkan pada upaya mengatasi masalah sampah. Lingkungan yang bersih berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia," ujar Hasto.

Ia juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pariwisata. Menurutnya, strategi efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari sektor wisata. "Jangan sampai karena efisiensi anggaran, justru menghambat sektor pariwisata dan menurunkan pendapatan daerah," katanya.

Bupati Bantul terpilih, Abdul Halim Muslih, menyampaikan Gubernur DIY menekankan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan menyesuaikan program dengan perubahan yang sedang terjadi. "Program pemerintah harus bermanfaat dan berdampak nyata bagi

masyarakat," katanya.

Pesan soal efisiensi anggaran juga ditekankan oleh Sri Sultan HB X. "Efisiensi ini sebuah keniscayaan. Anggaran harus digunakan secara optimal agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tambah Halim.

Adapun, Bupati Sleman terpilih, Harda Kiswaya, mengungkapkan Gubernur DIY mengarahkan agar APBD kabupaten kota harus selaras dengan kebijakan pusat dan pemerintah daerah. "APBD tematik menjadi pendekatan yang baik agar program pembangunan lebih terarah dan efektif," ujarnya.

Waktu Pelantikan

Sementara itu, kepala daerah terpilih asal DIY rencananya dilantik pada Kamis (20/2) mendatang di Jakarta. Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati pelantikan kepala daerah tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dilakukan serentak.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2). Meski demikian, pemerintah dan DPR belum memaparkan waktu pelantikan kepala daerah tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda berdalih hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi pada masa yang akan datang. "Tanggalnya sebetulnya Pak Mendagri sudah mengusulkan 20 Februari 2025, tapi atas dasar kehati-hatian dan memberikan fleksibilitas atas berbagai dinamika yang mungkin saja terjadi di depan, Komisi II DPR RI menyerahkan sepenuhnya jadwal ini kepada pemerintah melalui Mendagri," jelas Rifqinizamy. (Bisnis.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005